PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 52 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan peternakan, sumber daya laut dan perikanan di daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantul ;
6. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD ;
9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan , Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang peternakan, kelautan dan perikanan .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang peternakan, kelautan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang peternakan, kelautan dan perikanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang peternakan, kelautan dan perikanan ;
- e. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya ;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan, kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perumusan Rencana dan Program;
 2. Seksi Data dan Statistik;
 3. Seksi Pengendalian;
 - d. Sub Dinas Produksi Ternak, terdiri dari :
 1. Seksi Bibit ;
 2. Seksi Pakan;
 3. Seksi Bimbingan dan Kaji Terap ;
 4. Seksi Redistribusi dan Pengolahan Ternak ;
 - e. Sub Dinas Bimbingan dan Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Usaha ;
 2. Seksi Pemasaran ;
 3. Seksi Pengolahan, Pembinaan Mutu dan Bagi Hasil;
 4. Seksi Kemitraan dan Permodalan ;
 - f. Sub Dinas Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 3. Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 4. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - g. Sub Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi budidaya dan Pembenihan ;
 2. Seksi Penangkapan, Perlindungan Sumber daya Ikan Dan Lingkungan ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 4. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Nelayan;
 - h. UPTD, terdiri dari :
 1. Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a) Kepala Unit ;
 - b) Petugas Tata Usaha ;
 - c) Petugas Unit Retribusi ;